



pantau gambut

Masihkah Layak Indonesia Disebut Negara Agraris?

Kumpulan artikel untuk memeriahkan
Hari Tani Nasional

2024

Publikasi ini merupakan kumpulan artikel hasil buah pikir dari lima penulis terpilih pada kompetisi menulis artikel singkat dengan tema “Masihkah Layak Indonesia Disebut Negara Agraris?” untuk memeriahkan Hari Tani Nasional Tahun 2024.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia.

Penulis

Diana Wahyuni, Ahmad AUFAR, Wahyu Maulana Endris, Matthew Filbert, Sulaiman El Qadiry

Editor

Pantau Gambut

Versi 1.0. dipublikasikan pada 24 September 2024

Jaringan Pantau Gambut

Jl. Mimosa Blok F-2, Pejaten Barat
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
ask@pantaugambut.id
pantaugambut.id

Ilustrasi sampul depan ©Pantau Gambut



Publikasi ini dilisensi oleh Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Tanah yang Hilang dari Potret Palsu Negara Agraris

Diana Wahyuni

Tak ada yang lebih ironis daripada negara yang mengklaim dirinya agraris, tetapi memaksa petani kecil menjadi korban modernisasi yang sebenarnya tak pernah mereka inginkan. Kian hari lahan pertanian milik masyarakat kian terpinggirkan. Proyek-proyek raksasa datang dengan janji kesejahteraan, tetapi yang kita lihat hanyalah deretan sawit, pabrik, dan tambang yang menghancurkan ekosistem lokal. Lahan gambut, yang dulu dipuja karena perannya menjaga iklim dan ekosistem, kini diubah menjadi lahan produktif untuk kepentingan industri besar. Seolah-olah produktivitas hanya bisa diukur berdasarkan nilai jual di pasar global, bukan dari bagaimana tanah itu bisa tetap lestari dan memberi kehidupan pada komunitas lokal.

Tentu saja ini bukan sekadar soal tanah yang hilang, melainkan tentang bagaimana negara menanggalkan identitas agraris dan menggantinya menjadi negara yang tunduk pada kapitalisme global. Lahan gambut yang semestinya dilestarikan sebagai penyimpan karbon justru dijadikan tempat bagi monokultur sawit sehingga malah mempercepat perubahan iklim yang seharusnya dilawan oleh tanah gambut itu sendiri.¹ Kita tidak hanya berbicara tentang kekalahan ekosistem, tetapi juga tentang kekalahan manusia. Para petani yang menjadi bagian dari tanah itu dipaksa minggir. Mereka kehilangan akses, kehilangan hak, dan kehilangan suara.

Apakah Indonesia masih layak disebut negara agraris? Pertanyaan ini muncul berkali-kali, tetapi jawabannya makin kabur. Dalam retorika resmi, Indonesia masih negara agraris.² Kenyataannya, agraria bukan lagi tentang hubungan manusia dengan tanah secara langsung, melainkan tentang bagaimana tanah dipakai untuk mendukung industri dan menambah angka-angka pertumbuhan yang tak pernah menjangkau petani kecil. Ketimpangan agraria di Indonesia meningkat secara signifikan dan mereka yang hidup dari lahan pertanian semakin terjepit di tengah gempuran ekonomi industri. Selama dua dekade terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian menurun drastis, tetapi menurunnya angka-angka itu tak serta merta berarti ada transformasi yang positif di dalamnya.³ Ada yang hilang dan ada yang tergeser. Bukan kemajuan, melainkan para petani kecil yang terpaksa bertahan di pinggir-pinggir cerita pembangunan.

Pada akhirnya, yang hilang bukan hanya lahan, tetapi juga cara hidup yang telah terbentuk selama berabad-abad. Petani tak lagi dianggap penting dalam narasi pembangunan modern. Mereka dianggap penghalang sehingga harus diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih besar dan lebih efisien, meski dengan mengorbankan alam dan manusia yang hidup di dalamnya. Ini bukan negara agraris. Ini negara yang kehilangan kontak dengan tanah, dengan akarnya sendiri.

1 Wetlands International. 2020. The Role of Peatlands in Fighting Climate Change.

2 Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Indonesia: Negara Agraris yang Terus Tumbuh

3 Abduh, Muhammad. 2023. Indonesia Agricultural Transformation: How Far? Where Would It Go? The Indonesian Journal of Development Planning Volume VII No. 1 April 2023/ Page:25-82.

Apalah Negara Agraris itu?

Ahmad Aufar

Sejak dulu, orang senang sekali menyematkan gelar negara agraris pada Indonesia. Citra hamparan sawah nan luas berseliweran dalam berbagai media, dari lukisan indah ala *Mooi-indie* sampai publikasi pejabat meresmikan *anu-ini* di sawah. Waktu kecil pun saya dan rekan bocah masih sempat bikin perkara di sawah, semisal tidak sengaja menginjak padi orang saban berburu *keuyeup* alias keping sawah. Tapi sebenarnya apa itu negara agraris?

Menurut berbagai sumber, konon negara dapat disebut sebagai negara agraris bilamana kebanyakan penduduknya atau perputaran ekonominya bersumber dari ranah pertanian.¹ Sayang sekali, kalau menggunakan definisi yang tadi disebut, Indonesia sudah bukan negara agraris lagi. Per tahun 2022, persentase penduduk yang bekerja sebagai petani hanya tinggal 29,9%, sementara porsinya pada PDB hanya di 13,02%.² Jika ada pertanyaan apakah Indonesia merupakan negara agraris, tentu jawabnya adalah tidak.

Sudah menjadi semacam alur, bahwa negara umumnya bermula sebagai komunitas agraris. Seiring dengan perkembangan zaman, industri mulai mengambil alih porsi pertanian dalam kontribusi pemasukan maupun angkatan kerja.³ Negara-negara maju industrialis yang ternama seperti Amerika Serikat atau Cina, semuanya telah melewati fase agraris sebelum menjadi seperti sekarang. Porsi atau persentase pertanian yang menurun bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, apalagi hanya semata gelar negara agraris.

Sawah dan perkebunan yang ada sekarang kemungkinan besar dulunya merupakan hutan. Misal pulau Jawa pada zaman sebelum kompeni diselimuti hamparan rimba yang dihuni harimau dan begal. Konversi besar-besaran hutan menjadi sawah dan kebun terjadi sejak zaman kolonial, bahkan gelaran negara agraris pun muncul pada era ini (ironis bukan?). Kini pulau Jawa hanya memiliki kantung-kantung hutan dalam bentuk taman konservasi.

Daripada meributkan gelar negara agraris bau-bau kolonial, yang perlu dikhawatirkan adalah *pertaniannya* itu sendiri. Persentase pertanian dalam PDB Cina tidak terlalu besar hanya 7,1% jauh di bawah Industri (38,3%), tapi Cina boleh dibilang penguasa hasil tani sedunia dengan beragam ekspor dari sayur-buah sampai kudapan.⁴ Lalu bagaimana dengan negara (bukan) agraris Indonesia?

1 Andie. (2022, August). Indonesia Negara Agraris dan Nasib Petani yang Tragis – Fakultas Pertanian (Faperta). In Faperta Uniska. <https://faperta.uniska-bjm.ac.id/indonesia-negara-agraris-dan-nasib-petani-yang-tragis/>

2 Pertanian, P. D. dan S. I. (2013). ANALISIS PDB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2023 (p. 25). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.

3 Textor, C. (2024, May). China: GDP distribution across economic sectors 2023 | Statista. In Statista. <https://www.statista.com/statistics/270325/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-china/>

4 Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). China at a glance | FAO in China | Food and Agriculture Organization of the United Nations. In Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/china/fao-in-china/china-at-a-glance/en/>

5 Oshima, H. T. (1986). The Transition from an Agricultural to an Industrial Economy in East Asia. *Economic Development and Cultural Change*, 34(4), 783–809.

Banyaknya rakyat yang menggantungkan pendapatan di sektor pertanian tidak sebanding dengan pemasukan. Pada saat yang sama, pemerintah memberi insentif dan subsidi untuk pengembang membuka perumahan baru dan mengubah fungsi lahan tani menjadi perumahan subsidi. Hutan yang tersisa di pulau besar lainnya seperti Kalimantan dan Papua, justru dibabat habis untuk dikorek hasil bumi di dalamnya. Perkebunan sawit yang muncul malahan seringkali hanya kedok untuk pembalakan kayu.⁶ Suramnya lagi, industri sebagai pengganti agrikultur pun ikut tumbang, gelombang PHK terjadi dimana-mana. Duh, apa negara ini sudah ganti gelar jadi negara kerukan saja?

6 Wirasaputra, K. (2005). Berburu Kayu di Kebun Sawit - Forest Watch Indonesia. <https://fwi.or.id/berburu-kayu-di-kebun-sawit/>

Masih Bisakah Indonesia Disebut Negara Agraris?

Wahyu Maulana Endris

Indonesia sering disebut sebagai negara agraris karena sektor pertanian yang mendominasi ekonomi dan menjadi tumpuan hidup banyak penduduknya. Namun, realitas saat ini menunjukkan predikat tersebut mulai dipertanyakan, terutama karena banyak proyek besar yang menggusur lahan pertanian masyarakat. Alih fungsi lahan gambut untuk proyek pemerintah dan perkebunan besar merusak ekosistem, menyebabkan kerusakan melalui penebangan, pengeringan, dan pembakaran, yang berujung pada pelepasan emisi karbon ke atmosfer.¹

Lahan gambut adalah ekosistem yang kaya biodiversitas dan berperan penting dalam menyerap karbon, tetapi saat kering di musim kemarau, ia mudah terbakar, dengan api menyebar di bawah permukaan, menghasilkan asap tebal dan melepaskan karbon yang memperparah pemanasan global.² Namun, lahan ini sering dipaksakan menjadi "lahan ideal" untuk proyek komersial, seperti perkebunan kelapa sawit atau pembangunan infrastruktur. Akibatnya, lahan gambut rusak, habitat satwa liar hilang, dan emisi gas rumah kaca meningkat, memperburuk krisis iklim.³

Proyek-proyek besar juga kerap menggeser petani kecil dan masyarakat adat yang bergantung pada tanah tersebut. Konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK.⁴ Mereka kehilangan akses terhadap lahan yang dikelola turun temurun, dan seringkali dipaksa menjadi buruh di tanah yang dulu milik mereka. Ketimpangan dalam penguasaan tanah dan hilangnya kedaulatan pangan membuat definisi "negara agraris"

1 Pantau Gambut. (2014). Apa saja ancaman yang ada di atas lahan gambut. Pantau Gambut, diakses pada tanggal 18 September 2024, dari <https://pantaugambut.id/peta-gambut/ancaman#apa-saja-ancaman-yang-ada-di-atas-lahan-gambut-slide-2>

2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). KLHK Lakukan berbagai Upaya Mencegah Kebakaran Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses pada tanggal 18 September 2024 dari https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/777

3 IUCN. (2021). Peatlands and climate change. IUCN, diakses pada tanggal 18 September 2024, dari <https://iucn.org/resources/issues-brief/peatlands-and-climate-change#3843>

4 Wijaya, Benni. (2024). Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia. Konsorsium Pembaruan Agraria, diakses pada tanggal 18 September 2024 dari <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

semakin hilang.

Fokus pada kelapa sawit sebagai komoditas ekspor utama, dengan total ekspor mencapai 16,94 miliar USD pada tahun 2016, lebih menguntungkan korporasi besar daripada masyarakat lokal, meski melebihi ekspor Migas.⁵ Ketergantungan pada pasar global membuat ekonomi dan pangan masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Krisis pangan lokal pun bisa terjadi karena lahan pertanian yang dulu memproduksi pangan, kini dialihkan untuk komoditas komersial.

5 Yusa, S.M. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Pengusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Petani. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, diakses pada 18 September 2024 dari <https://www.bpdp.or.id/Dampak-Sosial-Ekonomi-Pengusahaan-Kelapa-Sawit-Terhadap-Kesejahteraan-Petani>

Masyarakat Adat: Pahlawan Agraria Nusantara yang Terancam Sirna

Matthew Filbert

Tanaman padi, yang menjadi sumber karbohidrat utama masyarakat Indonesia, apabila tidak diolah lebih lanjut pada akhirnya akan mati dan tidak berguna juga. Begitulah analogi saya terhadap realita label “negara agraris” Indonesia saat ini. Hingga kini, Indonesia masih terjebak dengan doktrin kolektif “kita negara agraris”.¹ Label ini, terutama sejak orde baru, telah ditanamkan kepada berbagai generasi sejak awal kita mengenyam pendidikan. Malangnya, hal tersebut hanyalah bentuk romantisasi kita terhadap cerita masa lampau sebab kini kita sudah tidak layak untuk disertakan dalam kelompok negara agraris.

Sebagai negara yang melabeli dirinya sebagai “negara agraris”, Indonesia masa kini sudah tidak mampu memenuhi kriteria negara agraris sebab segala karakteristik negara agraris justru bersifat kontra-realita dengan data lapangan Indonesia saat ini. Salah satu contoh nyata dari kasus ini adalah terkait jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Berdasarkan data BPS 2023, telah terjadi penurunan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) 2023 sebesar 7,45% dibandingkan UTP tahun 2013.² Ironinya, di antara fakta statistik yang terus menurun, pemerintah negeri ini masih tidak dapat berpihak kepada para petani yang tersisa di lahan-lahan mandiri.

Salah satu kelompok produktif yang masih menjadi penopang angka Usaha Pertanian Perorangan di negeri ini adalah masyarakat adat. Namun, konflik agraria terus mengintai dan mengancam masa depan komunitas ini. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada tahun 2023 sendiri telah terdapat 2.578.073 hektar lahan adat yang dirampas oleh negara dan korporasi.³ Diperkuat dengan maraknya megaproyek negara, status kepemilikan lahan masyarakat adat menjadi terancam akibat tumpang-tindih kepentingan dengan petahana.

1 Lailatussuyukriah. (2015). INDONESIA DAN KONSEPSI NEGARA AGRARIS. Jurnal Seuneubok Lada, 2(1)

2 Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i.html>

3 Lahay, S. (2024, March 21). Masyarakat Adat Minim Perlindungan, Penetapan Hutan Adat pun Lamban. Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2024/03/21/masyarakat-adat-minim-perlindungan-penetapan-hutan-adat-pun-lamban/>

Kita dapat menyoroiti megaproyek kebanggaan pemerintah saat ini, Ibu Kota Nusantara (IKN). Megaproyek seluas 252,660 hektar dibangun tidak hanya di tanah-tanah negara tetapi juga di tanah masyarakat adat.⁴ Diperluas dengan kenyataan UU IKN yang kontroversial dan ketidakmampuan masyarakat adat dalam menyediakan bukti kepemilikan lahan, komunitas ini menjadi kelompok marginal yang terancam akan terusir dari lahannya sendiri di masa mendatang akibat kehadiran megaproyek IKN. Hal ini berimplikasi pula pada timbulnya potensi semakin berkurangnya petani lokal karena lahan-lahan yang dirampas demi megaproyek IKN.

Perompakan hak petani kecil terhadap lahannya oleh megaproyek negara seharusnya menyadarkan kita terhadap realita bahwa label “negara agraris” telah lama usang. Apabila ingin mengemban label tersebut, seharusnya pemerintah mampu mengupayakan kebijakan pro-petani dibandingkan pro-investor. Ketidakmampuan pemerintah untuk berdiri bersama masyarakat adat sebagai salah satu pahlawan pelestari sektor agraria menunjukkan ketidakseriusan negara dalam mengemban label “negara agraris”. Jika *status-quo* terus berlanjut, saya khawatir gagasan “Indonesia negara agraris” hanya akan menjadi cerita pengantar tidur di masa depan.

4 Hartono, Mimin D. (2024, August 20). Independence and the Fate of Indigenous Peoples in IKN. Kompas.id; Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/08/20/en-kemerdekaan-dan-nasib-masyarakat-adat-di-ikn>

Masih Bisakah Indonesia Disebut Negeri Agraris?

Dampak Keserakahan Pemerintah terhadap Lahan Pertanian dan Ekosistem Gambut

Sulaiman El Qadiry

Indonesia dikenal sebagai negeri agraris dengan kekayaan lahan pertanian yang melimpah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, label ini semakin terancam akibat keserakahan pemerintah yang berfokus pada proyek-proyek pembangunan besar. Salah satu dampak paling signifikan adalah konversi lahan gambut yang dulunya menjadi lahan penting bagi pertanian berbasis masyarakat.

Proyek-proyek pemerintah yang mengutamakan pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan pertimbangan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Lahan gambut, yang sebelumnya menjadi ekosistem vital untuk pertanian tradisional dan berfungsi sebagai penyimpan karbon serta penyeimbang iklim lokal, kini banyak diubah menjadi area perkebunan skala besar dan proyek pembangunan.

Pemerintah, dalam upayanya untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan ekspansi industri, sering kali memaksakan perubahan ini tanpa mempertimbangkan kerusakan jangka panjang yang ditimbulkan.

Konversi lahan gambut untuk proyek-proyek besar ini mengakibatkan kerusakan parah pada ekosistem gambut. Pengerangan lahan gambut dan pembukaan lahan untuk pertanian intensif mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan hilangnya kemampuan lahan untuk menyimpan air serta mengatur iklim.

Proses ini sering diiringi dengan pembakaran hutan yang menyebabkan polusi udara, mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, dan memperburuk dampak perubahan iklim.

Kerugian ekologis dari konversi ini sangat signifikan. Ekosistem gambut yang kaya akan keanekaragaman hayati kini kehilangan habitatnya, yang mengancam spesies flora dan fauna yang bergantung pada lingkungan ini. Kehilangan fungsi ekologis gambut seperti penyimpanan karbon dan pengaturan iklim lokal berdampak buruk pada perubahan iklim global dan kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, dampak dari konversi ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tergantung pada lahan gambut untuk mata pencaharian mereka, seperti pertanian dan perikanan.

Dengan latar belakang ini, meskipun Indonesia masih memiliki lahan pertanian, label “negeri agraris” semakin sulit dipertahankan. Untuk menjaga identitas agrarisnya, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali kebijakan pembangunan dan memastikan bahwa pengelolaan lahan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan lahan serta mengadopsi praktik berkelanjutan adalah langkah krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

-
1. Badan Restorasi Gambut (BRG), “Laporan Tahunan 2023.”
 2. World Resources Institute (WRI), “Konversi Lahan Gambut dan Dampaknya,” 2022.
 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), “Pengelolaan Ekosistem Gambut,” 2023.
 4. National Geographic, “Dampak Ekosistem Gambut,” 2023.
 5. Badan Pusat Statistik (BPS), “Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Pertanian di Indonesia,” 2023.